



Peran Kearifan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Pesisir (Studi Kasus di Desa Nenassiam, Kabupaten Batubara)

Februati Trimurni¹, Dara Aisyah², Sally Marisa Sihombing³, M. Deny Effendy Tambusay⁴

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Corresponding Author: daisyah@usu.ac.id

INFO PASAL

Log Artikel:

Received: 06 Mei 2025

Revised: 25 Mei 2025

Accepted: 14 Juni 2025

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN:XXX

P-ISSN:XXX

Kutipan:

Trimurni.F,Aisyah.Sihombing.S.M, D. Tambusay.M.D.E.,(2025). Peran Kearifan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Pesisir (Studi Kasus di Desa Nenassiam, Kabupaten Batubara), *SAJJANA: Public Administration Review* 3(1).

ABSTRAK

Desa pesisir sering kali dihadapkan pada berbagai masalah, seperti, minimnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, ketidakmampuan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta tingginya ketidakterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sehingga menyebabkan desa pesisir sulit untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran kearifan budaya lokal dapat memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa pesisir di Desa Nenassiam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan pengetahuan lokal masyarakat dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan budaya lokal memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Kearifan lokal mendorong terwujudnya pengambilan keputusan yang berbasis konsensus, memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Namun, tantangan terbesar adalah pengintegrasian kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas menghadapi tekanan modernisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai lokal. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa mendorong penguatan kelembagaan yang berbasis pada kearifan dan potensi lokal serta memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan desa. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial budaya masyarakat pesisir, guna menciptakan desa pesisir yang berdaya dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Desa Pesisir, Kearifan Lokal

ABSTRACT

Coastal villages are often confronted with various issues, such as limited transparency and accountability in village fund management, the community's inability to sustainably manage natural resources, and a high level of disengagement from active participation in decision-making processes, all of which hinder the development of coastal villages. This study aims to analyze the role of local cultural wisdom in improving the quality of governance in coastal villages, specifically in Desa Nenassiam. The main objective of this research is to explore how local values such as mutual cooperation, deliberation, and the local knowledge of the community can enhance decision-making processes, increase community participation, and optimize the management of village resources. The methodology employed is a descriptive qualitative approach with a case study, utilizing data collection techniques such as participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings of this



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

study indicate that local cultural wisdom has a significant impact on improving village governance. Local wisdom fosters consensus-based decision-making, strengthens transparency in the management of village budgets, and increases active community participation in all aspects of development. However, the greatest challenge lies in integrating local cultural wisdom into broader development policies, especially in the face of modernization pressures that may erode local values. This study recommends that local governments promote the strengthening of institutions based on local wisdom and potential and expand community participation in every stage of village policy planning and implementation. The implications of this study highlight the importance of policies that are more inclusive and responsive to the socio-cultural needs of coastal communities, in order to create empowered and sustainable coastal villages.

Keyword: Governance, Coastal Villages, Local Wisdom

1. Latar Belakang

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menandai fase penting dalam sejarah pemerintahan desa di Indonesia. Regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan Masyarakat (Mutmainah & Faizin, 2023). Semangat otonomi desa yang dikedepankan pemerintah pusat sejatinya membuka ruang inovasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal (Suhendar, 2020). Namun, dalam praktiknya, tata kelola desa sering kali masih bersifat administratif-formalistik, mengandalkan pendekatan teknokratis, dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dinamika sosial budaya masyarakat desa itu sendiri (Abisono, 2018).

Kinerja pemerintahan desa dewasa ini juga menunjukkan gejala ketimpangan antara kewenangan yang diberikan dan kapasitas kelembagaan yang tersedia (Sari et al., 2025). Munculnya problematika klasik seperti rendahnya kualitas perencanaan partisipatif, lemahnya akuntabilitas penggunaan dana desa, serta minimnya inovasi pelayanan publik menjadi indikator bahwa tata kelola desa belum sepenuhnya berjalan optimal (Rosyan, 2018). Terlebih, pemerintah desa cenderung mengadopsi pendekatan "copy-paste" dari kebijakan tingkat atas, tanpa penyesuaian yang memadai dengan struktur sosial dan nilai lokal masyarakatnya (Marwiyah et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif otonomi desa dengan realitas sosial yang berlangsung di lapangan.

Kondisi ini semakin kompleks ketika konteks tata kelola diterapkan pada wilayah pesisir, seperti Desa Nenassiam di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Desa pesisir tidak hanya menghadapi tantangan geografis seperti keterpencilan, rawan bencana, dan ketergantungan pada sektor perikanan, tetapi juga menghadapi persoalan sosial-budaya yang khas (Saanopaka & Afgani, 2019). Wilayah ini umumnya dihuni oleh komunitas dengan struktur adat yang kuat, kepercayaan kolektif berbasis agama yang kental, dan praktik sosial yang sudah mengakar (Yuliana, 2021). Dalam konteks demikian, tata kelola pemerintahan desa tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara sistem formal dan sistem nilai lokal yang hidup dalam Masyarakat (A Kinseng, 2021). Hal ini mengharuskan pemerintah desa untuk mengembangkan model tata kelola yang tidak sekadar administratif, tetapi juga kontekstual dan inklusif.

Secara teoritis, tata kelola desa yang ideal mengacu pada prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas (Dwiyanto, 2008 dalam Oktapriadi & Rahman, 2023). Dalam konteks pemerintahan lokal, Rhodes (1996) menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor (pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi lokal) dalam membangun mekanisme tata kelola yang adaptif dan partisipatif. Selanjutnya, konsep kearifan lokal menjadi penting dalam mendekatkan kebijakan publik dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Koentjaraningrat (2009) memandang kearifan lokal sebagai pengetahuan dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan social (Faiz & Soleh, 2024). Dalam kajian administrasi publik, Antlöv (2003) menyebut bahwa kebijakan desa yang tidak mempertimbangkan struktur sosial-budaya setempat cenderung gagal memperoleh legitimasi social (Pane, 2019). Sementara itu, teori partisipasi warga yang dikembangkan oleh Arnstein (1969) melalui "*Ladder of Citizen Participation*" menggambarkan tingkatan keterlibatan masyarakat, dari sekadar tokenism hingga kontrol warga yang otentik. Dalam banyak konteks desa, partisipasi sering kali masih berada pada tingkat simbolik, tanpa daya pengaruh nyata terhadap keputusan publik (Tambusay & Aisyah, 2024). Beberapa studi sebelumnya memperkuat pentingnya integrasi nilai lokal dalam tata kelola desa. Studi oleh Maksin et al. (2024) menunjukkan bahwa pelayanan publik di desa adat Ngadisari menjadi efektif ketika dilakukan melalui pendekatan berbasis adat dan ritual lokal. Sementara Sharon & Arif (2024) mengkaji peran

musyawarah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa melalui musyawarah yang berbasis partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan dana desa dapat lebih transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata publik. Meskipun demikian, gap penelitian masih terlihat dalam minimnya studi yang secara spesifik menganalisis bagaimana peran elemen-elemen kearifan lokal baik bahasa, lembaga keagamaan, maupun struktur sosial tradisional diintegrasikan ke dalam praktik administrasi pemerintahan desa secara sistematis, khususnya di wilayah pesisir yang berkarakter multikultural dan religius. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan model tata kelola desa yang bersifat kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap dinamika lokal. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal masyarakat Desa Nenassiam mempengaruhi praktik tata kelola pemerintahan desa dalam kerangka administrasi publik desa yang efektif.

2. Metode

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam dinamika sosial dan kultural yang melandasi praktik tata kelola pemerintahan desa. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami makna, nilai, dan persepsi masyarakat terkait praktik administrasi desa yang dijalankan dalam kerangka kearifan lokal. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan realitas sosial secara kontekstual dan reflektif.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. **Observasi Partisipatif**
Observasi dilakukan terhadap praktik layanan publik, forum musyawarah, kegiatan sosial keagamaan (wirid, gotong royong, pengajian), serta interaksi warga dengan perangkat desa.
2. **Wawancara Mendalam**
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan berbagai informan kunci, meliputi, Kepala desa dan perangkat desa (sekretaris, kepala dusun, ketua RT/RW), tokoh adat dan tokoh agama (ustadz, pemuka masyarakat), dan warga dari berbagai latar belakang (nelayan, ibu rumah tangga, pemuda). Wawancara difokuskan pada persepsi informan terhadap nilai-nilai lokal yang digunakan dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta pengelolaan dana desa.
3. **Studi Dokumentasi**
Data tambahan diperoleh dari dokumen resmi desa seperti RPJMDes, APBDes, laporan kegiatan desa, data pokok desa, data pokok potensi SDA dan SDM, data perkembangan desa; dan data dasar keluarga. Dokumen ini digunakan untuk mengonfirmasi dan melengkapi data hasil observasi dan wawancara.

2.3 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik Desa Nenassiam sebagai desa pesisir dengan struktur sosial yang kental dengan budaya Melayu yang kuat. Keberadaan lembaga sosial seperti kelompok wirid ibu-ibu, remaja masjid, dan peran aktif tokoh adat dalam musyawarah desa menjadikan Desa Nenassiam sebagai desa yang representatif dalam studi tata kelola berbasis kearifan lokal. Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, dengan mempertimbangkan posisi sosial, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam proses tata kelola desa. Teknik triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas temuan melalui perbandingan antara observasi, wawancara, dan dokumen.

2.4 Penentuan Informan

Untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan mengenai praktik tata kelola pemerintahan desa berbasis kearifan lokal, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan ditentukan berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pemerintahan desa, pengetahuan terhadap budaya lokal, serta partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan yang menjadi bagian dari praktik tata kelola di Desa Nenassiam.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Informasi yang Dibutuhkan	Jumlah	Teknik Pengumpulan	Keterangan
1	Kepala Desa Nenassiam	Struktur pemerintahan, sistem pengambilan keputusan,	1 orang	Wawancara, Observasi, dan	Informan Kunci

		integrasi kearifan lokal dalam tata kelola		Dokumentasi	
2	Sekretaris Desa	Mekanisme administratif, pelayanan publik berbasis lokal, dokumen kebijakan	1 orang	Wawancara dan Dokumentasi	Informan Utama
3	Kepala Dusun (Dusun I dan V)	Praktik komunikasi sosial, pendekatan adat, serta pola koordinasi dengan masyarakat	2 orang	Observasi, Wawancara	Informan Utama
4	Tokoh Adat dan Agama (Ustadz, Ketua Wirid)	Nilai-nilai adat, keagamaan, budaya Melayu, serta peran dalam musyawarah desa	2 orang	Wawancara, Observasi	Informan Utama
5	Warga Desa (Ibu Rumah Tangga, Pemuda, Nelayan)	Persepsi terhadap pelayanan publik, partisipasi dalam forum sosial, efektivitas program desa	4 orang	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Informan Pendukung

Total Informan: 10 orang

2.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola makna (tema) dalam data kualitatif secara sistematis, sehingga cocok digunakan untuk mengungkap hubungan antara praktik tata kelola desa dengan elemen-elemen kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat. Tahapan analisis data dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses ini dilakukan dengan menyortir, merangkum, dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu tata kelola pemerintahan dan peran kearifan lokal. Data yang tidak berkaitan dengan fokus kajian dikeluarkan atau disimpan untuk keperluan pendukung narasi.

2. Interpretasi dan Penyajian Data (*Interpretation*)

Data yang telah dianalisis secara tematik diinterpretasikan dengan mengaitkan antara temuan lapangan dan konsep teoretis yang digunakan, seperti teori *governance* (Dwiyanto, Rhodes), partisipasi (Arnstein), serta konsep kearifan lokal (Koentjaraningrat, Antlöv). Interpretasi ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kearifan lokal terintegrasi ke dalam sistem tata kelola pemerintahan desa.

Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan, serta triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu, *member checking* dilakukan secara terbatas kepada beberapa informan untuk memastikan kebenaran informasi dan interpretasi.

3. Hasil dan Pembahasan

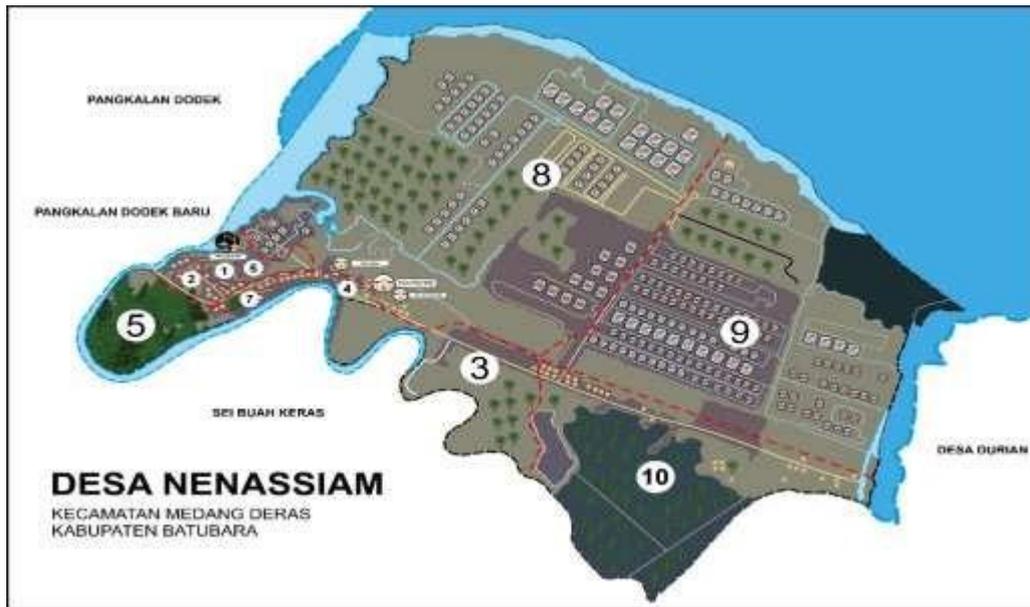
3.1 Profil Sosial, Budaya, dan Ekonomi Desa Nenassiam

Desa Nenassiam terletak di pesisir utara Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu desa tertua di wilayah ini. Lokasi Desa Nenassiam sangat strategis, dengan jarak hanya sekitar 6 menit perjalanan dari kantor Camat Medang Deras dan 1 jam dari pusat pemerintahan Kabupaten Batubara. Desa ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara, Desa Sei Buah Keras di selatan, Kelurahan Pangkalan Dodek di barat, dan Desa Durian di timur.

Desa Nenassiam terdiri menjadi 10 dusun, (lihat gambar 1) yang terbagi dalam 1) Dusun I Penambangan; 2) Dusun II Pematang; 3) Dusun III Pinggir Sungai; 4) Dusun IV Mesjid; 5) Dusun V Pematang Baru; 6) Dusun VI Pelabuhan; 7) Dusun VII Bunga Tanjung; 8) Dusun VIII Pendidikan; 9) Dusun IX Kampung Besar; 10) Dusun X Meriam. Penomoran dusun di Desa Nenassiam berdasarkan gambar 1 dihitung berurutan berdasarkan dusun yang letaknya paling dekat dari pusat pemerintahan desa Nenassiam. Dusun I Penambangan merupakan pusat pemerintahan desa Nenassiam karena kantor Desa Nenassiam terletak di Dusun I Penambangan. yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tanjung Selamat dan Desa Tanjung Putus. Letak dusun di desa Nenassiam sangat rapat dan berdekatan hanya dibatasi oleh jalan.

Masyarakat Desa Nenassiam mayoritas beragama Islam dan bersuku Melayu, dengan sekitar 98% beragama Islam dan 90% berbahasa Melayu. Agama lain yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat adalah Buddha dan suku lain seperti Jawa, Batak, dan Tionghoa. Bahasa Melayu menjadi bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari antarwarga, termasuk dalam forum sosial desa. Keberagaman suku bangsa di Desa

Nenassiam juga dapat dilihat dari proses adaptasi bahasa yang terjadi, di mana warga non-Melayu pun fasih berbahasa Melayu akibat tingginya frekuensi penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Peta Desa Nenassiam

Secara demografis, Desa Nenassiam memiliki total 894 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.781 jiwa. Penduduk desa tersebar di berbagai rentang usia, dengan mayoritas berada pada rentang usia produktif. Desa ini juga memiliki proporsi lebih banyak laki-laki (51%) dibandingkan perempuan (49%), dengan kelompok usia 0-20 tahun (Generasi Z dan Alpha) mendominasi. Meskipun desa ini memiliki sebagian kecil penduduk lansia, mereka tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi desa.

Desa Nenassiam menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pendidikan masyarakatnya. Meskipun banyak warga yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, generasi muda semakin banyak yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA sederajat. Desa ini juga memiliki berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMA. Namun, akses pendidikan menengah pertama (SMP) masih menjadi tantangan, karena anak-anak di desa ini harus pergi ke desa terdekat untuk melanjutkan Pendidikan.

Ekonomi rumah tangga di Desa Nenassiam sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai buruh harian, peternak udang dan ikan, serta karyawan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendapatan masyarakat sangat bergantung pada sektor perikanan mengingat hampir 90% pemukiman masyarakat berada di sepanjang pesisir laut yang berbatasan dengan Selat Malaka. Selain itu, banyak masyarakat juga yang memiliki hewan ternak seperti unggas dan ikan, yang mereka jadikan sebagai sumber pendapatan utama atau sebagai pekerjaan sampingan. Transaksi jual beli ternak sering kali dilakukan pada hari-hari tertentu seperti hari besar keagamaan atau acara adat, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pada saat tersebut.

Dalam hal infrastruktur, Desa Nenassiam menunjukkan kemajuan dalam hal kelayakan hunian dan akses terhadap fasilitas dasar. Sebagian besar rumah tangga di desa ini memiliki atap rumah berbahan seng (90%), dan tembok sebagai dinding rumah (80%). Meski demikian, terdapat sekitar 10% rumah yang masih memiliki atap dari daun nipah. Meskipun kondisi rumah sudah cukup layak huni, masih terdapat sebagian rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Desa ini juga sudah teraliri listrik dengan mayoritas rumah tangga menggunakan listrik PLN (99%), dan air bersih yang didapatkan dari sumur bor atau air hujan. Dalam hal sanitasi, 80% rumah sudah dilengkapi dengan fasilitas sanitasi pribadi yang layak, meskipun masih ada sekitar 20% rumah yang menggunakan jamban umum.

Kondisi kesehatan masyarakat di Desa Nenassiam juga masih menjadi perhatian. Meskipun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, bidan desa, dan klinik cukup mudah dijangkau, masyarakat cenderung lebih mengutamakan pekerjaan sebagai nelayan dan sering mengabaikan pentingnya perawatan kesehatan. Penyakit-penyakit seperti malaria, hipertensi, dan DBD masih ditemukan di desa ini, dan layanan kesehatan sering kali hanya diakses untuk pengobatan ringan.

Masyarakat Desa Nenassiam memiliki beberapa jenis aset rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar rumah tangga memiliki pompa air sebagai alat untuk mendapatkan air bersih dari sumur atau mata air, karena pasokan air PDAM tidak tersedia secara merata. 94,3% rumah tangga sudah memiliki pompa air, yang mempermudah mereka dalam mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci. Selain itu, motor juga menjadi aset yang sangat penting, mengingat jarak yang cukup jauh antara rumah dan berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor desa. Sebanyak 94% rumah tangga memiliki motor sebagai alat transportasi utama. Perahu atau boat juga menjadi aset yang sangat penting bagi hampir semua keluarga, karena sebagian besar penduduk Desa Nenassiam berprofesi sebagai nelayan. Dengan perahu ini, mereka dapat mencari nafkah di laut, yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Terkait dengan status kepemilikan rumah, sekitar 73% rumah tangga di desa ini sudah memiliki rumah sendiri, sementara sekitar 20% tinggal di rumah orang tua atau sanak saudara. Mayoritas rumah tangga yang tinggal di rumah milik orang tua melakukan hal tersebut sebagai bentuk penghormatan atau untuk merawat orang tua. Secara keseluruhan, aset rumah tangga yang dimiliki oleh masyarakat Desa Nenassiam, seperti pompa air, motor, dan perahu, mencerminkan adaptasi mereka terhadap perubahan zaman dan kebutuhan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai nelayan.

3.2 Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Nenassiam dipimpin oleh Kepala Desa yang dalam tanggung jawabnya didukung oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan tata usaha, keuangan, perencanaan, dan seksi-seksi pemerintahan lainnya. Desa ini memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa, pemerintah desa juga memberikan tanggung jawab kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program desa disusun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam program pembangunan desa mencakup pendidikan, kesehatan, dan kawasan pemukiman. Di sektor pendidikan, pemerintah desa berhasil mendirikan PAUD dan madrasah nonformal, sedangkan di sektor kesehatan, program-program Posyandu seperti pemberian makanan tambahan dan insentif untuk tenaga kesehatan telah dilaksanakan. Di bidang pemukiman, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas air bersih juga sudah terlihat, di mana masyarakat sebelumnya melakukan MCK di pinggiran sungai, namun kini menggunakan air sumur bor yang lebih layak.

Namun, pada sejak penelitian ini dilakukan, Desa Nenassiam tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) karena ketidakberhasilan BUMDES sebelumnya dan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengalihkan fokus pada pemulihan ekonomi nasional.

Regulasi desa di Desa Nenassiam telah tercatat dengan baik dengan beberapa contoh surat ataupun keputusan-keputusan Kepala Desa seperti yang terlihat pada tabel 2. Sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh Kepala Desa Nenassiam kepada masyarakatnya, Anggaran pendapatan dan belanja Desa Nenassiam dapat dilihat tiap tahunnya melalui Baliho yang dipasang di dekat Kantor Desa. Berdasarkan data yang ada, berikut dapat dilihat dalam tabel 3 dan 4 rincian Dana Desa Nenassiam di tahun 2022.

Tabel 2. Keputusan-Keputusan Kepala Desa Nenassiam

No	Nomor dan Tanggal Keputusan Kepala Desa	Tentang
1.	No. 13/2023 17 Januari 2023	Pengangkatan dan Pembentukan Kadek Sub PPKBD Desa Nenassiam
2.	No. 15/2023 17 Januari 2023	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting
3.	No. 16/2023 17 Januari 2023	Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD dan Posyandu Mutiara
4.	No. 10/2023 4 Januari 2023	SK Satgas Covid 2019
5.	No. 12/2023 17 Januari 2023	Pembentukan Tim Pengelola dan Tempat Pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting Desa Nenassiam

Tabel 3. Pendapatan APBDes Nenassiam

Sumber Pendapatan	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Desa	-	-
Alokasi Dana Desa	Rp. 461.876.334	Rp. 230.938.167
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 95.965.913	Rp. 47.982.956
Dana Desa	Rp. 1.178.127.000	Rp. 387.550.800
Jumlah	Rp. 1.735.969.247	Rp. 666.471.923

Tabel 4. Belanja APBDes Nenassiam

Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 705.753.502	Rp. 346.496.204
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 121.800.000	Rp. 107.300.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 362.746.480	Rp. 128.664.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 44.000.000	-
Jumlah	Rp. 1.792.299.982	Rp. 721.960.204

3.3 Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Kearifan Lokal Desa

Penelitian ini menggunakan lima indikator utama kriteria kearifan lokal masyarakat Desa Nenassiam untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam dan sosial. Indikator-indikator ini mencakup pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, dan pengambilan keputusan lokal. Setiap indikator ini digunakan untuk menggali bagaimana masyarakat desa memanfaatkan dan mengelola sumber daya mereka, yang sangat dipengaruhi oleh budaya, adat, dan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat. Adapun lima kriteria utama yang mendasari penggunaan sumber daya di desa, dapat dilihat dalam indikator-indikator tabel 5.

Tabel 5. Kearifan Lokal dalam Penggunaan Sumber Daya

Kriteria Kearifan Lokal	Indikator
Pengetahuan Lokal (<i>Local Knowledge</i>)	Penggunaan sumber daya berkaitan dengan pengetahuan lokal seperti geografi, demografi, dan sosiologi.

Nilai Lokal (<i>Local Values</i>)	Penggunaan sumber daya berkaitan dengan nilai-nilai lokal dalam masyarakat seperti larangan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
Keterampilan Lokal (<i>Local Skills</i>)	Penggunaan sumber daya yang mendorong dan mengakomodasi keterampilan lokal, salah satunya potensi untuk industri rumah tangga.
Sumber Daya Lokal (<i>Local Resources</i>)	Penggunaan sumber daya yang dapat mengoptimalkan keberadaan sumber daya hayati, air dan tempat tinggal.
Pengambilan Keputusan Lokal (<i>Local Decision Making</i>)	Mendorong iklim demokratis melalui mekanisme pengambilan keputusan yang diatur secara lokal dan dilaksanakan secara musyawarah.

Setiap indikator dalam tabel 5 berfungsi untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Desa Nenassiam mengelola sumber daya yang ada di sekitar mereka. Dengan kata lain, kearifan lokal tidak hanya terlihat pada pemahaman dan praktik sosial masyarakat, tetapi juga bagaimana keberlanjutan dan pengelolaan yang bijaksana dilakukan dalam mengelola sumber daya alam, dari tanah, air, hingga kekayaan hayati yang ada.

3.3.1 Pengetahuan Lokal (*Local Knowledge*)

Pengetahuan Masyarakat tentang perubahan cuaca dan tanda-tanda alam yang terjadi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Desa Nenassiam. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, mereka memiliki pengetahuan lokal yang sangat dalam mengenai kondisi alam sekitar. Misalnya, untuk memprediksi hujan, masyarakat Desa Nenassiam mengamati tanda-tanda alam, seperti cuaca langit yang mendung dan suara hewan-hewan tertentu, seperti kodok dan jangkrik yang sering terdengar menjelang hujan. Tanda-tanda ini menjadi indikator alam yang digunakan oleh masyarakat untuk merencanakan aktivitas mereka, seperti pertanian dan perikanan.

Masyarakat juga memperhatikan penurunan suhu menjelang hujan, yang bagi mereka adalah salah satu pertanda alam yang menandakan turunnya hujan. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Nenassiam telah mengembangkan sistem pengetahuan alam yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan mereka. Keberadaan hutan nipah dan daerah pesisir yang masih asri juga berkontribusi pada keberagaman alam yang memudahkan masyarakat untuk membaca tanda-tanda alam tersebut.

Perubahan musim juga menjadi bagian dari pengetahuan yang sangat spesifik bagi masyarakat Desa Nenassiam. Pada masa lampau, mereka dapat mengetahui pergantian musim dengan mengamati pasang surut air laut dan kondisi langit. Saat ini, meskipun perubahan iklim membuat pergantian musim menjadi kurang teratur dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya, masyarakat masih menggunakan pengetahuan tradisional ini untuk memprediksi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pertanian dan perikanan mereka. Desa Nenassiam, yang dikelilingi oleh lahan hijau dan dekat dengan sumber mata air seperti sungai, memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat kaya. Masyarakat desa sangat memahami dan memanfaatkan flora dan fauna yang ada di sekitar mereka, baik sebagai bahan makanan, obat, atau bahan kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, buah nipah yang ditemukan di sekitar pesisir sering digunakan oleh masyarakat untuk membuat minuman segar yang bermanfaat untuk kesehatan, seperti mencegah penyakit ginjal, diabetes, dan panas dalam, serta memiliki khasiat anti-kanker. Selain itu, fauna seperti kerang kepah, lokan, dan ikan laut menjadi sumber pangan penting bagi masyarakat. Kerang kepah yang sering ditemukan di sekitar pesisir laut merupakan sumber protein yang tinggi dan juga kaya akan omega-3, yang bermanfaat bagi kesehatan otak dan kekebalan tubuh. Pengetahuan tentang hasil laut ini tidak hanya mencakup konsumsi rutin, tetapi juga aktivitas perdagangan produk-produk laut tersebut, seperti ikan asin, yang banyak dijemur oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dijual ke luar daerah.

Masyarakat Desa Nenassiam, yang mayoritas beragama Islam, memiliki pengetahuan waktu yang sangat baik, terutama dalam mengatur aktivitas sosial dan keagamaan mereka. Mereka menguasai dengan baik kalender Hijriah, yang menjadi dasar untuk menentukan waktu-waktu yang baik untuk melaksanakan kegiatan ibadah, seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, dan perayaan lainnya. Pengetahuan tentang waktu ini juga sangat dipengaruhi oleh pergerakan bulan yang dihitung berdasarkan kalender Hijriah, serta kalender

Masehi yang mengacu pada revolusi bumi terhadap matahari. Selain itu, meskipun pengetahuan tentang perubahan hari dan bulan masih bersifat umum di kalangan masyarakat, mereka tetap memanfaatkan perhitungan tradisional untuk memperkirakan waktu-waktu yang sesuai dalam melaksanakan aktivitas adat dan sosial. Pengetahuan lokal tentang waktu ini sangat penting dalam menjaga ritme kehidupan masyarakat, yang terkait dengan tata kelola sosial dan keagamaan.

Masyarakat Desa Nenassiam juga memiliki pengetahuan yang baik tentang ruang dan bilangan, yang dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari mereka, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Pengetahuan tentang bentuk bangunan, seperti rumah yang berbentuk datar, segi empat, atau kerucut, mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memahami ruang dan struktur bangunan. Hal ini tidak hanya terkait dengan pembangunan fisik, tetapi juga terkait dengan penataan ruang dalam konteks kehidupan sosial mereka. Selain itu, masyarakat Desa Nenassiam juga menggunakan bahasa Melayu Pesisir dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup penyebutan bilangan dan pecahan tradisional, seperti "nul", "satu", "duo", "tigo", "ompat", dan seterusnya. Penyebutan bilangan ini menjadi ciri khas yang mencerminkan keberagaman budaya Melayu yang sangat kuat di desa ini. Pengetahuan tentang bilangan dan pecahan ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Nenassiam yang masih dipertahankan hingga saat ini.

3.3.2 Nilai Lokal (Local Values)

Nilai lokal di Desa Nenassiam sangat berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini dapat dilihat dalam tradisi, adat istiadat, dan peraturan sosial yang mengatur interaksi masyarakat dengan alam dan sesama. Masyarakat di Desa Nenassiam menjunjung tinggi prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, kepedulian terhadap alam, serta kesetaraan sosial yang berakar pada budaya Melayu dan agama Islam yang dianut mayoritasarganya.

Salah satu nilai lokal yang paling mendalam di Desa Nenassiam adalah kepedulian terhadap alam. Masyarakat desa ini sangat memahami bahwa kehidupan mereka bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang tercermin dalam kegiatan pertanian, perikanan, dan penggunaan sumber daya alam lainnya. Tradisi gotong royong dalam mengelola sumber daya alam, seperti penanaman pohon mangrove di pesisir laut dan pengaturan batasan penangkapan ikan, mencerminkan bagaimana masyarakat Desa Nenassiam menjaga kelestarian alam. Mereka percaya bahwa keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam harus didasarkan pada nilai-nilai keharmonisan dengan alam, yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Melayu. Di samping pengelolaan alam, gotong royong juga merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Nenassiam. Nilai ini terlihat jelas dalam berbagai aktivitas, seperti pembangunan infrastruktur desa, perayaan hari raya, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gotong royong memungkinkan masyarakat untuk saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan bersama, tanpa memandang status sosial.

Sebagai contoh, dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat tidak hanya bergotong royong dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam hal pembagian daging kurban dan penyediaan makanan untuk berbuka puasa. Semua warga desa, baik kaya maupun miskin, merasa terlibat dalam proses ini, menunjukkan bagaimana nilai kesetaraan dan kebersamaan sangat penting dalam kehidupan sosial mereka.

Masyarakat Desa Nenassiam memiliki kepercayaan dan aturan adat yang mengatur kehidupan sosial mereka, yang menekankan pada keadilan dan tanggung jawab terhadap sesama. Misalnya, dalam kegiatan seremonial adat seperti pernikahan, terdapat aturan yang memastikan bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama dalam proses perayaan dan pembagian hasil dari kegiatan tersebut. Pantun yang dibacakan dalam pernikahan adalah simbol dari komunikasi yang harmonis antara keluarga pengantin, dan hal ini mencerminkan nilai keadilan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Selain itu, dalam hal pembagian hasil alam, masyarakat Desa Nenassiam mengutamakan transparansi dan keadilan. Ini terlihat dalam pembagian hasil laut yang diperoleh, seperti ikan dan kerang kepah, yang dibagikan secara merata sesuai dengan kontribusi masing-masing individu dalam kegiatan penangkapan hasil laut. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan sosial yang mendalam dalam budaya mereka.

Organisasi sosial di Desa Nenassiam juga mencerminkan pentingnya nilai gotong royong dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kelompok sosial dibentuk, baik di kalangan pemuda, remaja masjid, maupun ibu-ibu perwiran, untuk mendukung kehidupan sosial dan pembangunan desa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran penting dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Misalnya, remaja masjid yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, serta ibu-ibu perwiran yang menggelar doa bersama di rumah-rumah warga, tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi keagamaan, tetapi juga berperan dalam mempererat hubungan sosial antarwarga desa. Keterlibatan aktif dalam organisasi sosial ini memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan, yang menjadi fondasi kehidupan

sosial yang stabil di Desa Nenassiam. Namun, meskipun nilai-nilai lokal ini masih sangat kuat, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang mengarah pada perubahan pola pikir generasi muda. Banyak dari mereka terlebih dari kalangan anak muda yang lebih tertarik pada gaya hidup modern yang di satu sisi bertentangan dengan nilai-nilai adat yang telah lama dianut oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, penting bagi tokoh adat dan tokoh agama untuk terus mendidik generasi muda agar tetap melestarikan nilai-nilai lokal, sekaligus mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan perkembangan zaman yang ada.



Gambar 2. (a) Pengajian Tasyakuran Haji; (b) Perayaan Menyambut Tahun Baru Islam

3.3.3. Keterampilan Lokal (Local Skills)

Keterampilan Lokal di Desa Nenassiam merupakan keterampilan-keterampilan tradisional yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Keterampilan ini tidak hanya berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan kekuatan budaya lokal yang erat kaitannya dengan pola hidup masyarakat yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan kehidupan sosial yang solid. Secara keseluruhan, keterampilan lokal yang ada di Desa Nenassiam adalah hasil dari pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui tradisi lisan, pengamatan alam, dan inovasi dalam penggunaan sumber daya alam yang ada di desa. Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui terdapat beberapa keterampilan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Nenassiam, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada, diantaranya:

1. Keterampilan Pertanian

Meskipun Desa Nenassiam bukan daerah pertanian utama, sebagian masyarakat di desa ini tetap mengembangkan kebun kelapa sawit dengan menggunakan peralatan pertanian tradisional. Di setiap rumah tangga di Dusun I Penambangan, Dusun II Pematang, Dusun III Pinggir Sungai, Dusun IV Mesjid, Dusun V Pematang Baru, Dusun VI Pelabuhan, Dusun VII Bunga Tanjung, Dusun VIII Pendidikan, Dusun IX Kampung Besar, dan Dusun X Meriam, alat-alat pertanian sederhana sering ditemukan, meskipun tidak ada penggunaan teknologi canggih dalam bidang pertanian. Beberapa keterampilan pertanian yang digunakan oleh masyarakat Desa Nenassiam adalah:

- Dodos Sawit: Alat tradisional berbentuk besi pipih dengan gagang panjang yang digunakan untuk memanen kelapa sawit yang tinggi. Keterampilan dalam menggunakan dodos mengharuskan petani untuk memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam memotong pelepah sawit dengan presisi.
- Parang Babat: Parang yang digunakan untuk memotong rumput dan membersihkan lahan pertanian. Penggunaan parang ini mengindikasikan keterampilan dalam pekerjaan kasar pertanian yang mengutamakan kecepatan dan ketepatan.
- Cangkul: Cangkul yang digunakan untuk menggali dan menggemburkan tanah. Keterampilan menggunakan cangkul sangat penting dalam proses persiapan tanah untuk penanaman berbagai jenis tanaman.

2. Keterampilan Perikanan

Karena sebagian besar Desa Nenassiam terletak di daerah pesisir, kegiatan perikanan menjadi mata pencaharian utama. Keterampilan dalam menggunakan peralatan perikanan tradisional telah diajarkan secara turun-temurun dan masih digunakan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Beberapa alat perikanan yang digunakan adalah:

- Kincir Air: Digunakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air. Keterampilan menggunakan kincir air sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup ikan dalam tambak.
- Jaring Batu: Alat yang digunakan untuk menangkap gurita, dengan cara meletakkan jaring hingga ke dasar laut. Keterampilan ini memerlukan pengalaman dalam mengetahui lokasi gurita dan cara meletakkan jaring dengan tepat.

- Pancing: Pancing yang digunakan untuk memancing ikan target. Meskipun bentuknya sederhana, keterampilan memancing ikan ini membutuhkan keahlian dalam memilih umpan yang tepat dan teknik memancing yang baik.
- Bubu Ikan: Perangkap ikan yang dipasang pada aliran air. Keterampilan dalam menggunakan bubu ikan sangat bergantung pada pemilihan lokasi yang tepat di aliran sungai atau laut untuk menangkap ikan.
- Tambak Udang: Budidaya udang menggunakan kolam yang digali di tanah. Keterampilan ini mencakup pemeliharaan udang dalam tambak dan penanganan yang hati-hati dalam pemeliharaan udang hingga siap dipanen.



Gambar 3. Kincir Modern di tambak udang

3. Keterampilan Pembangunan Rumah dan Infrastruktur

Masyarakat Desa Nenassiam memiliki keterampilan dalam pembangunan rumah dan infrastruktur sederhana yang mereka bangun dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar desa. Meskipun tidak ada teknik atau alat bangunan khas yang berasal dari desa ini, keterampilan dalam membangun rumah tradisional atau semi permanen tetap terlihat jelas. Beberapa peralatan yang digunakan dalam pembangunan rumah adalah:

- Gergaji dan Palu: Alat dasar yang digunakan untuk memotong dan menyusun bahan bangunan, seperti kayu dan bambu.
- Mesin Bor dan Molen (Pengaduk Semen): Digunakan dalam pembangunan rumah permanen atau semi permanen. Keterampilan menggunakan mesin ini membutuhkan pemahaman tentang konstruksi bangunan dan cara mengaplikasikan bahan bangunan secara efisien.
- Sekop dan Obeng: Digunakan dalam pekerjaan tanah dan penyusunan elemen-elemen struktural bangunan.

4. Keterampilan dalam Penggunaan Peralatan Tradisional dan Rumah Tangga

Walaupun masyarakat Desa Nenassiam telah beralih ke penggunaan peralatan rumah tangga modern, beberapa perkakas tradisional masih dipertahankan, seperti:

- Cobek (Batu Gilingan): Perkakas tradisional yang digunakan untuk menumbuk bahan makanan, seperti bumbu-bumbu atau rempah-rempah. Masyarakat masih menggunakan cobek ini dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat desa juga menguasai keterampilan dalam membuat pakaian tradisional dan peralatan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, meskipun sekarang telah mulai beralih ke penggunaan pakaian modern dalam kehidupan sehari-hari.

5. Keterampilan dalam Penggunaan Alat Transportasi

Salah satu alat transportasi tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat Desa Nenassiam adalah perahu. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, perahu menjadi alat utama yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun untuk transportasi antar dusun. Beberapa jenis perahu yang digunakan adalah:

- Perahu Dayung: Perahu tradisional yang digerakkan dengan tenaga manusia melalui dayung.

- Perahu Bermotor: Perahu yang menggunakan motor untuk penggerakannya, mempermudah perjalanan menuju lokasi perikanan yang lebih jauh.

3.3.4. Sumber Daya Lokal (Local Resources)

Sumber daya lokal di Desa Nenassiam sangat bergantung pada kondisi alam sekitar yang kaya dan beragam. Masyarakat Desa Nenassiam memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk mendukung kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari sumber daya hayati, sumber daya alam non-hayati, hingga sumber daya air dan tempat tinggal. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada pengetahuan tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap cara-cara berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan alam.

1. Sumber Daya Alam Hayati

Masyarakat Desa Nenassiam tinggal di wilayah yang dikelilingi oleh hutan nipah, perairan pesisir, dan aliran sungai yang melimpah dengan keanekaragaman hayati. Keberagaman flora dan fauna ini merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi masyarakat desa. Beberapa sumber daya hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat di antaranya adalah:

- Kelapa Sawit: Beberapa keluarga di Desa Nenassiam memiliki kebun kelapa sawit. Meskipun hanya sebagian kecil yang berfokus pada pertanian kelapa sawit, tanaman ini memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Selain itu, keberadaan kebun sawit menjadi bagian dari pemanfaatan lahan yang ada, walaupun sektor pertanian bukanlah fokus utama desa ini.
- Tanaman Nipah: Tanaman nipah yang banyak ditemukan di daerah pesisir Desa Nenassiam digunakan dalam berbagai kegiatan. Masyarakat menggunakan pelepah nipah untuk membuat atap rumah atau sebagai bahan baku lain, seperti untuk kerajinan tangan. Selain itu, buah nipah memiliki manfaat sebagai bahan baku minuman tradisional yang dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit ginjal dan diabetes.
- Perikanan Laut: Sebagai desa yang terletak di pesisir dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, perikanan laut menjadi sumber daya alam utama bagi masyarakat. Ikan, kerang, dan udang merupakan hasil laut yang banyak dimanfaatkan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun dijual ke pasar-pasar lokal.
- Mangrove: Keberadaan mangrove di sekitar desa memberikan banyak manfaat, baik dalam hal perlindungan pesisir dari abrasi laut, sebagai tempat tinggal bagi berbagai jenis fauna, maupun sebagai sumber bahan baku untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti kayu bakar atau bahan bangunan.

2. Sumber Daya Alam Non-Hayati

Selain sumber daya alam hayati, desa ini juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam non-hayati, termasuk tanah dan batu-batuan yang digunakan untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa contoh sumber daya non-hayati yang dimanfaatkan:

- Tanah: Tanah di Desa Nenassiam, meskipun tidak digunakan secara luas untuk pertanian besar, namun tetap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebun kelapa sawit atau untuk kegiatan budidaya udang di tambak udang. Tanah juga digunakan untuk membangun rumah dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
- Pasir dan Batu: Masyarakat Desa Nenassiam menggunakan pasir dan batu dari alam sekitar untuk keperluan pembangunan rumah. Pasir yang diambil dari area sungai atau pesisir digunakan untuk campuran semen, sedangkan batu digunakan untuk pondasi rumah atau jalan setapak di desa.

3. Sumber Daya Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi masyarakat Desa Nenassiam, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun perikanan. Desa ini memiliki akses yang baik terhadap air bersih dan sumber mata air yang tersebar di sekitar desa. Beberapa hal yang terkait dengan sumber daya air di desa ini adalah:

- Sumber Mata Air: Keberadaan sumber mata air di sekitar Desa Nenassiam mendukung kehidupan masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan mencuci, maupun untuk budidaya perikanan di tambak udang.
- Sumur Bor: Masyarakat Desa Nenassiam sangat bergantung pada sumur bor pribadi untuk memperoleh air bersih. Meskipun air sumur bor di desa ini sudah cukup layak konsumsi, masyarakat juga memanfaatkan air hujan sebagai alternatif untuk kebutuhan tertentu.
- Sungai Sei Buah Keras: Sungai yang mengalir di dekat desa ini memberikan sumber air yang sangat penting bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan perikanan, pertanian (meskipun terbatas), serta sebagai sarana transportasi lokal dengan menggunakan perahu.

4. Tempat Tinggal dan Bangunan

Masyarakat Desa Nenassiam memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk membangun tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan zaman, rumah-rumah di Desa Nenassiam telah mengalami perubahan, namun prinsip dasar pemanfaatan bahan bangunan lokal masih dipertahankan. Masyarakat desa menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar mereka, seperti:

- Bambu dan Kayu: Digunakan sebagai bahan bangunan untuk dinding, lantai, dan atap rumah tradisional.
- Batu dan Pasir: Sebagai bahan dasar untuk membuat pondasi rumah dan membangun jalan setapak yang menghubungkan antar dusun.

Meskipun sebagian besar rumah di Desa Nenassiam sekarang menggunakan bahan bangunan modern, seperti seng dan semen, bahan bangunan alami tetap menjadi bagian dari proses konstruksi rumah-rumah di desa ini.

3.3.5. Pengambilan Keputusan Lokal (*Local Decision Making*)

Pengambilan keputusan di Desa Nenassiam sangat bergantung pada prinsip musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian integral dari kearifan lokal masyarakat setempat. Setiap keputusan yang diambil, baik yang berkaitan dengan pembangunan, sosial, atau kegiatan keagamaan, selalu melalui proses musyawarah yang melibatkan perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan warga masyarakat. Proses musyawarah ini menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama, dengan tujuan memastikan bahwa semua pihak merasa didengarkan dan kebutuhan bersama dapat tercapai.

Masyarakat Desa Nenassiam memiliki tradisi kuat dalam musyawarah sebagai mekanisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Keputusan yang dihasilkan bukan hanya berdasarkan suara mayoritas, tetapi berupaya untuk mencapai konsensus yang adil, memperhatikan semua kepentingan, dan menjaga harmoni sosial. Peran tokoh adat dan tokoh agama sangat dominan dalam proses ini, di mana mereka memberikan arahan terkait nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di desa. Meskipun demikian, warga desa juga berperan aktif, memberikan masukan untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif.

Dalam pemerintahan desa, meskipun keputusan akhir diambil oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), prosesnya tetap sangat mengandalkan partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokratis yang diterapkan dalam pengelolaan desa, di mana keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan kolektif daripada kepentingan individu. Melalui musyawarah, masyarakat Desa Nenassiam memastikan bahwa transparansi, keadilan, dan akuntabilitas terjaga dalam setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya.

Keputusan yang diambil dalam musyawarah ini mengarah pada pengelolaan desa yang berkelanjutan, memperhatikan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan lokal di Desa Nenassiam tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi partisipatif yang kuat, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

3.4. Peran Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Nenassiam. Dalam hal ini, kearifan lokal berfungsi sebagai landasan nilai, yang mempengaruhi berbagai aspek pemerintahan, terutama pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Jika kita analisis dari aspek pengambilan keputusan desa, kearifan lokal di Desa Nenassiam sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa. Musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian dari kearifan lokal, menjadi mekanisme utama dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan desa. Prinsip ini mendorong tercapainya keputusan yang partisipatif dan inklusif, di mana semua suara warga desa, baik dari perangkat desa, tokoh adat, maupun tokoh agama, didengarkan. Hal ini juga mengarah pada pembentukan keputusan yang lebih legitimatif karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan nilai-nilai kolektif.

Misalnya, ketika ada kebijakan baru terkait pembangunan desa atau pengelolaan sumber daya alam, keputusan tersebut akan dibahas bersama-sama dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh warga dari berbagai latar belakang. Sebagai contoh, dalam pembangunan infrastruktur desa, seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan proyek, menjadikan proses ini lebih terbuka dan berkeadilan.

Keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah mufakat ini menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan sebagai landasan untuk menghindari perpecahan dan konflik, serta meningkatkan harmoni sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal mendukung pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan, di mana keputusan-keputusan yang diambil lebih dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Di samping itu, Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan tata kelola

pemerintahan desa. Dalam hal ini, nilai gotong royong dan musyawarah menjadi modal utama dalam mendorong partisipasi aktif warga desa. Masyarakat Desa Nenassiam memiliki tradisi kuat dalam melibatkan diri dalam keputusan kolektif melalui musyawarah yang tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan, tetapi juga mencakup kegiatan sosial dan keagamaan.

Gotong royong, yang merupakan bagian dari kearifan lokal, mendorong kolaborasi antarwarga desa dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa. Kegiatan seperti kerja bakti, penggalangan dana untuk pembangunan fasilitas umum, hingga perayaan hari besar agama dan adat, adalah contoh konkret dari bagaimana nilai gotong royong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat merasa memiliki keterikatan dengan pembangunan desa, yang meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka.

Selain itu, musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat memungkinkan untuk terciptanya ruang inklusif yang mendengar semua aspirasi warga, dari yang muda hingga yang tua. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi lebih berdaya dan membangun hubungan yang lebih solid antara pemerintah desa dan warga.

Pengaruh kearifan lokal juga terlihat dari dampaknya terhadap transparansi pemerintahan desa. Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang mendorong kejujuran dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, pemerintahan berbasis kearifan lokal di Desa Nenassiam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dan setiap penggunaan dana desa dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Musyawarah desa tidak hanya sebatas forum untuk membuat keputusan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengawasi dan mengontrol jalannya program-program yang ada, termasuk penggunaan anggaran.

Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan dana desa, keputusan terkait alokasi dana dilakukan melalui musyawarah terbuka yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya diberi kesempatan untuk memberikan masukan tetapi juga untuk mengawasi jalannya program. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini berperan penting dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, kehadiran tokoh adat dan tokoh agama dalam musyawarah desa juga memperkuat rasa tanggung jawab moral bagi para pengambil keputusan untuk menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, transparansi dalam pengambilan keputusan di Desa Nenassiam dapat dijaga dengan baik melalui pengaruh kuat dari kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Keberlanjutan kebijakan yang diambil berdasarkan kearifan lokal di Desa Nenassiam dapat dilihat dari adanya kesinambungan dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan partisipasi masyarakat, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, seperti penanaman mangrove untuk melindungi pesisir dari abrasi, didasarkan pada pengetahuan lokal tentang pentingnya ekosistem pesisir dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan semacam ini bukan hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Keberlanjutan ini juga dapat dilihat dalam pemberdayaan masyarakat yang terus menerus dilakukan melalui penguatan kapasitas warga untuk mengelola dan mengawasi program pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desa yang berbasis kearifan lokal tidak hanya berorientasi pada kemajuan jangka pendek, tetapi juga pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat Desa Nenassiam.

4. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan studi kasus di Desa Nenassiam, Kabupaten Batubara. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Desa Nenassiam memiliki kontribusi besar terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa, baik dalam aspek pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, maupun transparansi.

Kearifan lokal yang hidup dalam sistem pengetahuan, nilai, keterampilan, sumber daya, dan pengambilan keputusan lokal telah memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pengetahuan tentang alam dan pola musiman, misalnya, tidak hanya digunakan untuk pertanian dan perikanan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam desa. Nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah desa. Masyarakat Desa Nenassiam menunjukkan keterampilan lokal yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti

dalam sektor perikanan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Ini mencerminkan adanya pengelolaan sumber daya yang berbasis pada kearifan lokal, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah memberikan hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan dan penguatan kebijakan yang berbasis kearifan lokal, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diambil, tetapi juga pada kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa terus memperkuat sistem partisipatif dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan generasi muda. Penguatan lembaga sosial dan budaya lokal, termasuk lembaga pemuda dan seni, perlu menjadi perhatian utama untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ini akan meningkatkan kapasitas desa dalam merespon tantangan sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, keberlanjutan kebijakan berbasis kearifan lokal harus dijaga dengan mengintegrasikan pendekatan partisipatif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah desa diharapkan untuk terus mendorong transparansi anggaran dan kebijakan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pembangunan.

Referensi

- A Kinseng, R. (2021). Socio-cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.22500/9202134928>
- Abisono, F. G. (2018). Mengawal implementasi pembaruan desa dengan manajemen perubahan berbasis. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Dan Desa*, 27, 1–14.
- Arnstein, S. R. (1969). LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION This publication is made available in the context of the history of social work project . please do get in touch with us . Deze publicatie wordt beschikbaar gesteld in het kader van de canon sociaal werk . Zie www.canonsoci.nl. *J. Am. Inst. Planners*, 35(4), 216–224.
- Faiz, A., & Soleh, B. (2024). Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.22219/jinop.v7i1.14250>
- Maksin, M., Septiandika, V., Dewi, R. C., Yudianto, E., & Q, M. S. (2024). Model Pelayanan Terpadu Berbasis Kearifan Lokal : Kajian Penggabungan Pelayanan Adat Dan Administrasi Di Desa Ngadisari Mastina. *Jurnal Professional*, 11(2), 525–528.
- Marwiyah, S., Melani, A. P., Seda, F. La, Hasanah, U., Kurniawan, S., Fauzan, A., Melani, A. P., Seda, F. La, & Hasanah, U. (2022). *Dinamika Politik Teori Kontemporer*.
- Mutmainah, I., & Faizin, A. (2023). Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Industri Kecil Menengah Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 306–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i1.814>
- Oktapriadi, R., & Rahman, A. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Satu Milyar Satu Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi). *Swatantra*, 21(2), 161. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.161-168>
- Pane, E. (2019). The Reconstruction of Village Governance Towards Good Governance (Study in Kalianda District, South Lampung Regency). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1471>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, XLIV, 652–667.
- Rosyan, A. N. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Angewandte Chemie International Edition, Diponegoro*, 3, 10–27. fisip@undip.ac.id
- Saanopaka, E., & Afgani, Y. (2019). Budaya Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Cabaran Dalam Pemerksaan Masyarakat Desa Di Kepulauan Riau 1) Endri Sanopaka 2) Yendo Afgani (@Eusoff 1). *Jisipol*, 1(AGUSTUS), 21–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.56552/jisipol.v1i1.3>
- Sari, D. J., Sintia, L., Alfarihsy, M. G., Wijaya, A. D., & Hafizah, D. (2025). Kajian Tentang Ketidakefektifan Pengelolaan dan Pengawasan Apbdes Serta Strategi Penanganannya. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(1). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Sharon, S. S., & Arif, M. (2024). MUSYAWARAH SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 205–221.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.15>

Suhendar, D. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Desa. *Neo Politea*, 1(1), 43–61. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i1.102>

Tambusay, M. D. E., & Aisyah, D. (2024). Diagnosing Organizational Accountability for Inclusive Public Service (A Case Study Using the Burke – Litwin Transformational Framework). *Journal of Public Administration Studies*, 9(2), 35–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2024.009.02.5>

Yuliana. (2021). The dynamics of the socio-cultural life of coastal communities. *Journal of Aquaculture Science*, 6(11S), 28–36. <https://doi.org/10.31093/joas.v6i1is.153>